

2018

Peraturan Bupati Ngada Nomor 36 Tahun 2018

Tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah (RKPD) Daerah Tahun 2018





BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGADATAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap perubahan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan keuangan serta penyesuaian penggunaan SILPA tahun sebelumnya, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2018 merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara per Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerinrah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 718);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah Perubahan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah sebagai penyesuaian atas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2018;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan daerah; dan
 - f. Bab IV Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan urusan masing-masing dengan mengacu dan mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penyesuaian/*review* terhadap Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah masing-masing dan berdasarkan program dan kegiatan dan pagu indikatif yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 27 Juli 2018

PAULUS SOLIWOA
BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 27 Juli 2018

HIRONIMUS REBA WATU
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 36

NOMOR 36 TAHUN 2018 TANGGAL : 27 Juli 2018.
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (*bidang perencanaan dan penganggaran*) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam konteks penganggaran, RKPD dituangkan dalam Dokumen APBD, yang didahului dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Kepala Daerah dan DPRD. RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 telah dituangkan dalam dokumen anggaran, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018.

Sesuai ketentuan, pemerintah wajib melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi atas hasil RKPD, yang dalam konteks penganggaran merupakan pelaksanaan APBD. Pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dilaksanakan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran Pemerintah jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran Pemerintah tahunan (2018). Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala BP-Litbang dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah (PD) berdasarkan realisasi DPA Perangkat Daerah. Selain melaksanakan fungsi tersebut di atas, juga dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terjadi dalam kurun waktu penetapan RKPD (31 Mei 2018 sampai dengan 30 Juni 2018).

Memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sampai dengan semester pertama, Pemerintah Kabupaten Ngada memandang perlu melakukan **Perubahan RKPD**. Perubahan RPKD Kabupaten Ngada Tahun 2018 yang dikukuhkan

dengan Peraturan Bupati akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum (KU) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri 32 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pemerintah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada 2006-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

a. Maksud :

- 1) Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka menyusun Perubahan APBD yang didahului dengan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun 2018,
- 2) Sebagai Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2018

b. Tujuan :

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Ngada tahun 2018 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan serta perkembangan keadaan lainnya, sehingga target kinerja Pemerintah yang telah ditetapkan dapat dijaga pencapaiannya.

1.4 Sistematika RKPD Perubahan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pemerintah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah

BAB.II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat tentang dasar perubahan RKPD Tahun 2018.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pemerintah Daerah

Memuat tentang Tujuan, sasaran, dan prioritas Pemerintah.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat cakupan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab VI Penutup

Memuat hal – hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA)

Evaluasi hasil RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 memuat gambaran realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Juni 2018. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan 50 Perangkat Daerah, dalam mengemban Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan dan memperhatikan perkembangan lain yang mempengaruhi realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018.

2.1. Gambaran APBD Kabupaten Ngada Tahun 2018

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada pada Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2018, terdiri dari :

Tabel 2.1 Penjabaran APBD Tahun 2018

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	772.673.863.410
PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.982.457.595
Pajak Daerah	6.272.490.243
Retribusi Daerah	2.766.478.700
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.079.190.636
Lain-lain PAD yang sah	35.864.298.016
DANA PERIMBANGAN	598.432.139.000
Dana Bagi Hasil	9.220.643.000
Dana Transfer Umum	470.536.836.000
Dana Transfer Khusus	118.674.660.000

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
Pendapatan Hibah	20.887.223.357
Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	9.900.146.278
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96.471.897.000
TOTAL BELANJA	801.845.673.202
BELANJA TIDAK LANGSUNG	446.930.338.588,20
Belanja Pegawai	278.627.760.271,20
Belanja Hibah	6.880.000.000
Belanja Bantuan Sosial	14.474.933.417
Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	145.447.644.900
Belanja tidak terduga	1.500.000.000
BELANJA LANGSUNG	354.915.334.613,80
Belanja Pegawai	36.215.101.957
Belanja Barang dan Jasa	112.139.764.503
Belanja Modal	206.560.468.153,80
SURPLUS/DEFISIT	-29.171.809.792
PEMBIAYAAN DAERAH	29.171.809.792
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	29.171.809.792
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29.171.809.792
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	0,00

Belanja Daerah yang dialokasikan untuk belanja Pemerintah (Belanja Langsung) pada tahun 2018, sejumlah Rp. 354.915.334.613,80 untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib non pelayanan dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh : 50 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada, terdiri dari : 3 Badan, 20 Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BLUD Rumah Sakit Umum

Daerah dan Kecamatan (termasuk Kelurahan), dalam rangka pencapaian indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Ngada pada tahun 2018.

Tabel 2.2. Alokasi Belanja Langsung untuk masing-masing Misi RPJMD Tahun 2018

	MISI	PROGRAM PRIORITAS	SKPD	ALOKASI ANGGARAN	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Melanjutkan dan mempercepat Pemerintah infrastruktur (jalan, air listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan	1 Program Pemerintah Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR	129.682.900.000	109.182.811.140
		2 Program Pemerintah, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Dinas PUPR	4.000.000.000	2.664.659.000
		3 Program Lingkungan sehat Perumahan	Dinas Perumahan	4.416.305.000	4.848.884.000
		4 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup	37.675.000	37.675.000
		5 Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Dinas PMDP3A	97.383.100	97.383.100
TOTAL ANGGARAN MISI 1				138.234.263.100	116.831.412.240
2	Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian,	1 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PUPR	3.972.000.000	4.266.000.000

dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan	2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	751.288.000	1.089.360.000
	3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian	277.200.000	277.200.000
	4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian	3.662.482.000	3.677.897.000
	5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan	550,000,000	759.650.000
	6	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	607.160.250	465.214.250
	7	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	69.520.000	69.520.000
	8	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperasi	2.200,000,000	2.200.000.000
	TOTAL ANGGARAN MISI 2				12.089.650.250
3 Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan	1	Program Perencanaan Tata Ruang	BP Litbang, Dinas PUPR	926.446.000	547.790.000
	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	1.039.860.875	1.153.875.875
	5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan	50,000,000	50.000.000
	6	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian	Dinas Perhubungan	150,000,000	150.000.000

		Kendaraan Bermotor			
		7 Program Kewirausahaan dan Keunggulan dan Keunggulan Kompetitif	Dinas Koperasi	600.000.000	600.000.000
TOTAL ANGGARAN MISI KE 3				2.266.306.875	2.387.650.875
4	Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	5.872.507.000	4.296.467.000
		2 Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun	Dinas Pendidikan	25.466.510.500	25.528.164.500
		3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	554.291.800	554.291.800
TOTAL ANGGARAN MISI KE 4				31.893.309.300	30.378.923.300
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia	1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes	2.594.514.000	2.594.514.000
		2 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinkes	4.715.050.232	4.715.050.232
		3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	RSUD	34.174.933.,000	34.174.933.,000

		4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	7.665.794.000	8.246.024.000
		5	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes	2,000,000,000	2.017.000.000
		6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinkes	50.550,000	50.550,000
		7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	9.207.276.000	9.207.276.000
		8	Program Keluarga Berencana	Dinas KCKB	4.548.209.964	4.548.209.964
TOTAL ANGGARAN MISI KE 5					64.956.327.196	65.553.557.196
	Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat	1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	BPBD	342.312.500	343.012.500
		2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	386.093.790	386.093.790
		1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial	114.950.000	114.950.000
		2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbang	50.000.000	50.000.000
		3	Prigram Pendidikan Politik Masyarakat	Kesbang	9.710.000	9.710.000

TOTAL ANGGARAN MISI KE 6				903.766.290	903.066.290	
7	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	1	Program Pendidikan Kedinasan	BK Diklat	594.324.000	594.324.000
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas PUPR	3.034.000,000	3.121.815.000
		3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sunpro, Penanaman Modal, Keuangan	1.560.384.000	1.027.147.400
		4	Program Perencanaan Pemerintah Daerah	BP Litbang	772.239.000	968.539.000
		5	Program Pengembangan Data dan Informasi	BP Litbang	193.170.650	221.010.650
		6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinkes	278.070.000	278.070.000
		7	Program Peningkatan Sistim Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat	1.035.115.200	1.035.115.200
TOTAL ANGGARAN MISI KE 7				7.467.302.850	7.246.02.250	

2.2. Evaluasi Kinerja Sampai Triwulan II

2.2. 1 Evaluasi Kinerja Belanja

a). Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai dianggarkan sejumlah Rp. 278.627.760.271,20 sampai dengan bulan Juli 2018, terealisasi Rp. 119.249.219.331,- (64,34%);
- Belanja Hibah dianggarkan sejumlah Rp. 6.880.000.000,- , sampai dengan bulan Juni 2018, terealisasi sejumlah Rp.2.500.000.000,- (1,54%);

- Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sejumlah Rp. 14.474.933.417,- , sampai dengan bulan Juni 2018 terealisasi sejumlah Rp. 2.520.000.000,- (39,97%);
- Belanja Bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dianggarkan sejumlah Rp. 145.447.644.900,- , sampai dengan bulan Juni 2018 terealisasi sejumlah Rp. 30.524.937.879,- (32,54%);
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp. 1.500.000.000,-, sampai dengan bulan Juni 2018 terealisasi sejumlah Rp. 182.200.000,- (0,34%)

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Tidak Langsung sampai dengan Bulan Juli 2018

No	URAIAN	TARGET (RP)	PROPORSI (%)	KEUANGAN (RP)	PRESENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	278.627.760.271,20	62,34%	119.749.219.331	42,98
2	Belanja Hibah	6.880.000.000	1,54%	2.500.000.000	36,34
3	Belanja Bantuan Sosial	14.474.933.417	39,97%	2.520.000.000	17,41
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	145.447.644.900	32,54	30.524.937.879	20,99
5	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	0,34	182.200.000	12,15
Total		446.930.338.588,20	27,35	155.476.357.210	25,97

b). Belanja Langsung

Belanja Langsung yang dianggarkan pada tahun 2018, sejumlah Rp. 354.915.334.613,80 dengan realisasi sampai dengan bulan Juli 2018 Rp. 42.531.070.232 (11,98%).

Capaian Kinerja Belanja Langsung dari masing-masing Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan acuan Rencana Anggaran Kas masing-masing Perangkat Daerah (merupakan gambaran rencana realisasi belanja dan realisasi fisik kegiatan) dibandingkan dengan realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah yang bersangkutan kondisi Triwulan I dan II Tahun 2018.

Adapun capaian kinerja untuk masing-masing PD, kondisi sampai dengan Triwulan II (Juli 2018), sebagai berikut:

- terdapat sebanyak 48 (empat puluh delapan) PD, dengan capaian kinerja Sangat Rendah
- terdapat sebanyak 1 Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja Rendah yaitu: Dinas Ketahanan Pangan dan Bagian Pemerintahan Umum dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 54,48% dan 51,06 %.
- Terdapat 3 PD yang berkinerja sedang yaitu Bagian Administrasi kemasyarakatan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 63,49%
- Tidak ada PD yang berkinerja Tinggi
- Tidak ada PD yang berkinerja sangat tinggi

Secara lebih rinci terkait besaran rencana anggaran kas dan realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Kondisi sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 (Juli 2018) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Realisasi Belanja Langsung masing-masing SKPD kondisi sampai dengan Akhir bulan Juli 2018

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
					KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	54.462.880.462,80	217.473.894	54.245.406.568.80	0.40	0.40	SR
2	DINAS KESEHATAN	32.239.875.655	14.111.463.021	18.128.412.634	25.79	25.79	SR
3	RSUD BAJAWA (BLUD)	34.174.933.000	5.796.835.617	28.378.097.329	16,96	16,96	SR
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	146.279.265.775	7.195.812.780	139.083.452.995	4.92	1,55	SR
5	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.482.633.700	302.781.844	12.179.851.856	6.10	6.10	SR
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	359.710.000	100.251.550	259.458.450	27.87	27.87	SR
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	1.477.564.700	705.021.472	772.543.228	47.72	47.72	SR
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	934.976.400	221.509.084	713.467.316	23.69	23.69	SR
9	DINAS SOSIAL	1.212.165.400	300.533.686	911.631.714	24.79	24.79	SR
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.055.518.000	596.105.279	459.412.721	56.48	54.48	R

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
					KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.527.830.000	660.102.131	867.727.869	43.21	43.44	SR
12	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.014.702.301	648.264.781	6.366.437.520	27.97	27.97	SR
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	750.371.000	141.078.950	609.292.050	18.80	23.88	SR
14	DINAS PERHUBUNGAN	698.461.000	218.335.525	440.125.475	31.26	31.26	SR
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	431.665.000	85.696.000	345.969.000	19.85	19.85	SR
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	3.195.914.750	209.557.500	2.986.357.250	21.49	21.49	SR
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU	445.412.500	97.315.671	348.096.829	21.85	21.85	SR
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	523.375.000	217.323.500	306.051.500	41.53	41.53	SR
19	DINAS KEARSIPAN	226.040.000	91.673.690	134.366.310	40.56	40.56	SR
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	407.122.750	70.155.695	337.000.000	17.23	17.23	SR

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
					KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.340.779.000	202.416.500	1.138.362.500	16.05	16.35	SR
22	DINAS PERTANIAN	6.145.739.241	574.250.123	5.571.489.118	9.34	9.34	SR
23	DINAS PETERNAKAN	1.264.224.500	256.936.620	1.007.287.880	20.32	20.32	SR
24	DINAS PERINDUSTRIAN	321.600.000	118.103.677	203.496.323	36.72	36.72	SR
25	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	235.505.500	93.657.155	141.848.345	43.53	43.53	SR
	SEKRETARIAT DAERAH	9.227.826.562	2.541.988.458	6.685.838.104	27.55	27.68	SR
26	BAG. PEMERINTAHAN	669.464.700	341.843.580	327.621.120	51.06	51.06	R
27	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	219.980.000	81.086.667	138.893.333	36.86	42.32	SR
28	BAG. ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN	263.967.538	172.883.111	91.084.427	65.49	65.49	S
29	BAG. PEREKONOMIAN	176.944.000	82.694.000	94.250.000	46.73	46.73	SR
30	BAG. PENYUSUNAN PROGRAM	1.978.983.424	157.385.284	1.821.598.140	7.95	7.95	SR

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
					KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	BAG. HUKUM	650.000.000	178.502.500	471.497.500	27.46	27.46	SR
32	BAG. ORGANISASI	767.800.000	218.381.136	549.418.864	28.44	28.44	SR
33	BAG. UMUM	4.500.686.900	1.309.212.180	3.191.474.720	29.09	29.09	SR
34	SEKRETARIAT DPRD	7.946.004.300	3.727.826.071	4.218.178.229	46,91	46.91	SR
35	KEC. BAJAWA	1.178.672.420	397.848.249	780.824.171	33.75	33.75	SR
36	KEC. BAJAWA UTARA	189.678.500	-	-	-	-	
37	KEC. AIMERE	297.563.050	119.557.980				
38	KEC. GOLEWA	221.534.700	-	-	-	-	
39	KEC. GOLEWA BARAT	324.246.650	106.446.940	217.799.710	32.82	32.82	SR
40	KEC. GOLEWA SELATAN	256.081.769	85.325.869	170.755.900	33.32	33.32	SR

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
					KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	KEC. INERIE	248.467.307	103.528.045	144.939.262	41.67	41.67	SR
42	KEC. RIUNG	424.204.803	-	-	-	-	
43	KEC. SOA	168.855.500	46.667.650	122.187.850	27.64	27.64	SR
44	KEC. JEREBUU	189.539.550	78.974.815	110.564.735	41,67	41,67	SR
45	KEC. RIUNG BARAT	301.797.650	125.749.020	176.048.650	42	42	SR
46	KEC. WOLOMEZE	184.920.000	48.429.000	136.491.000	26.19	29.19	SR
47	INSPEKTORAT KABUPATEN NGADA	1.353.066.082	424.420.719	928.645.363	31,37	31,37	SR
48	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.471.730.900	383.808.300	2.087.922.600	18.77	18.77	SR
49	BADAN KEUANGAN	13.132.823.336	3.539.115.691	9.593.707.645	26.95	26.95	SR
50	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BK-DIKLAT)	5.023.308.200	2.156.968.712	2.866.339.488	42.94	42.94	SR
TOTAL		354.915.334.613	42.531.070.232	312.384.264.381	11,98	10.75	SR

Keterangan Capaian Kinerja :

- Sangat Rendah : ≤ 50 %
- Rendah : 50.01 – 65 %
- Sedang : 65.01 – 75 %
- Tinggi : 75.01 – 90 %
- Sangat Tinggi : 90.01 – 100 %

2.2.2 Evaluasi Capaian Visi dan Misi sampai keadaan Triwulan II

Jika dilakukan evaluasi terhadap pencapaian visi misi Bupati pada tahun 2018 sampai pada triwulan II terlihat bahwa realisasi fisik masih sangat rendah yakni mencapai 26,65 % dan realisasi keuangan baru mencapai 21,8 %. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Untuk 7 Misi Pemerintah Tahun 2018 Sampai Triwulan II (Juli 2018)

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI (%)	
					KEUANGAN	FISIK
1	Melanjutkan dan mempercepat Pemerintah infrastruktur (jalan, air listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan	1 Program Pemerintah Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR	129.682.900.000	0.07	0.07
		2 Program Pemerintah, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Dinas PUPR	4.000.000.000	10	10
		3 Program Lingkungan sehat Perumahan	Dinas Perumahan	4.416.305.000	6.37	6.37
		4 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup	37.675.000	0	50
		5 Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Dinas PMDP3A	97.383.100	46.21	46.21
TOTAL ANGGARAN MISI 1				138.234.263.100	12.53	22.53

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
					KEUANGAN	FISIK
2	Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan	1 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PUPR	3.972.000.000	0	0
		2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan	751.288.000	41.81	32
		3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian,	277.200.000	58	58
		4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian,	3.662.482.000	36	36
		5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan	550.000.000	8	8
		6 Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	607.160.250	23.72	17
		7 Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	69.520.000	14	32

		Program Peningkatan 8 Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperasi	2.200.000.000	10.9	24.87
TOTAL ANGGARAN MISI 2				12.089.650.250	24.05	25.98

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
					KEUANGAN	FISIK
3	Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan	Program Perencanaan Tata 1 Ruang	BP Litbang	926.446.000	31.93	31.93
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2 Persampahan	Lingkungan Hidup	1.039.860.875	49.5	22.8
		Program Peningkatan 5 Pelayanan Angkutan	Perhubungan	50.000.000	72	90
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 4 Kendaraan Bermotor	Perhubungan	150.000.000	0	0
		Program Kewirausahaan dan Keunggulan dan Keunggulan 5 Kompetitif	Dinas Koperasi	600.000.000	28.91	51.53
TOTAL ANGGARAN MISI KE 3				2.266.306.875	36.47	39.25

4	Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	5.872.507.000	0.52	0.52
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun	Dinas Pendidikan	25.466.510.500	0.18	0.18
		3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	554.291.800	7.80	7.80
TOTAL ANGGARAN MISI KE 4					31.893.309.300	2.8	2.8

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI		
					KEUANGAN	FISIK	
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes	2.594.514.000	0	0
		2	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinkes	4.715.050.232	0	0
		3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	RSUD	34.174.933.000	21	21
		4	Program Upaya Kesehatan	Dinkes	7.665.794.000	82.7	82.7

		Masyarakat				
		Program Kemitraan				
	5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes	2.000.000.000	39.7	39.7
	6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinkes	50.550.000	16.5	16.5
	7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	9.207.276.000	65.3	65.3
	8	Program Keluarga Berencana	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	4.548.209.964	14.82	14.82
TOTAL ANGGARAN MISI KE 5				64.956.327.196	30	30

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
					KEUANGAN	FISIK
6	Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta	1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	BPBD	342.312.500	0	0

memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	386.093.790	4.5	14.75
	3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial	114.950.000	37	37
	4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbang	50.000.000	50	100
	5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesbang	9.710.000	0	0
TOTAL ANGGARAN MISI KE 6				65.859.393.486	18.3	30.35

NO	MISI	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
					KEUANGAN	FISIK
7	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien,	1 Program Pendidikan Kedinasan	BK Diklat	594.324.000	4	50
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PUPR	3.034.000.000	0	0

efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sunpro, Penanaman Modal, Keuangan	1.560.384.000	2.21	2.21
	4	Program Perencanaan Pemerintah Daerah	BP Litbang	772.239.000	48.77	48.77
	5	Program Pengembangan Data dan Informasi	BP Litbang	193.170.650	35.05	35.05
	6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinkes	278.070.000	38.2	38.2
	7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat	1.035.115.200	75.28	75.28
TOTAL ANGGARAN MISI KE 7				7.467.302.850	29.07	35.64
ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS					21.8	26.65

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 pasal 4 menyatakan bahwa Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2018 dan Perubahan RKPD Tahun 2018 mengacu kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Perencanaan Pemerintah daerah.

Pasal 343 ayat (1) Permendagri 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pemerintah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pemerintah Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harusdigunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, serta memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dirumuskan dasar pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018, sebagai berikut :

3.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

3.1.1 Asumsi Ekonomi Makro

Asumsi pertumbuhan ekonomi Ngada masih belum berubah. Pertumbuhan ekonomi Ngada 2015-2016, cenderung positif yakni sebesar 5,19%. Pola kebijakan alokasi anggaran dari Pemerintah pusat maupun Kabupaten Ngada tahun 2016 dan 2018 yang difokuskan pada infrastruktur (Misi I), serta meningkatnya pola alokasi dana desa yang juga secara umum masih difokuskan pada belanja infrastruktur dasar desa, menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngada. Alokasi belanja modal yang menggambarkan investasi pemerintah tahun 2018 dan rencana perubahan tahun 2018 masih fokus pada infrastruktur serta meningkatnya alokasi belanja langsung ke masyarakat akan memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi Ngada.

Untuk inflasi, berdasarkan hasil penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), pada bulan Juni 2018 “year on year” sebesar 2,12 % . Kondisi inflasi ini masuk dalam kategori inflasi ringan. Dari ketujuh komponen pengeluaran , terjadi pergeseran yang sebelumnya komponen bahan makanan merupakan komponen pengeluaran yang nilai inflasinya

tertinggi yakni sebesar 7,92%, bergeser pada komponen kesehatan yang inflasinya tertinggi sebesar 3,56%.

Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan alokasi anggaran yang disepakati, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diprediksikan masih tetap yakni sebesar 5,1%-5,3%, dengan target inflasi, masih sama yakni ditargetkan dibawah 10 % dan Pengangguran terbuka diperkirakan dibawah 2 %.

Secara nasional target pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 mencapai 5,4 persen sampai 6,1 persen. Sementara Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen sampai 5,5 persen pada tahun 2018. Hal itu berdasarkan prediksi kontribusi investasi terhadap perekonomian domestik lebih kuat dari tahun ini, yang pada kuartal I 2018 hanya sekitar 4,81 persen. Adapun proyeksi BI ini lebih rendah dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018. yang mencapai 5,4 persen sampai 6,1 persen.

Sumbangan terbesar pembentuk struktur ekonomi Ngada tahun 2018 masih dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (A), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial (O), sektor Konstruksi (F), dan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (G).

3.1.2 Asumsi Umum

Asumsi dasar penyusunan APBD 2018 lebih berkaitan dengan beberapa faktor diluar kendali pemerintah daerah untuk mengintervensi yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan umum yang telah disepakati bersama. Beberapa asumsi tersebut adalah:

1. Dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, yang bersifat dinamis (d disesuaikan dengan naik turunnya pendapatan Nasional) diasumsikan tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Komponen dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak.
2. Belanja sektor swasta diasumsikan merespons positif belanja pemerintah. Artinya sektor swasta yang ada di Kabupaten Ngada mendukung belanja pemerintah, serta turut terlibat dengan pembelanjaan sendiri mendukung aktifitas sektor-sektor ekonomi swasta lainnya.
3. Daya beli masyarakat diasumsikan stabil karena terkendalinya inflasi dan adanya peningkatan pendapatan.
4. Kondisi sosial, politik, keamanan dan ketertiban menjelang dan pasca Pemilihan Gubernur dalam suasana kondusif untuk pelaksanaan Pemerintah.

Tabel 3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2018

URAIAN	APBD 2018	RANCANGAN APBD 2018
PENDAPATAN	772,673,863,410	772,726,253,410
PENDAPATAN ASLI DAERAH	46,982,457,595	46,982,457,595
Pajak Daerah	6,272,490,243	6,272,490,243
Retribusi Daerah	2,766,478,700	2,766,478,700
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,079,190,636	2,079,190,636
Lain-lain PAD yang sah	35,864,298,016	35,864,298,016
DANA PERIMBANGAN		
Dana Bagi Hasil	9,220,643,000	9,220,643,000
Dana Transfer Umum	470,536,836,000	470,536,836,000
Dana Transfer Khusus	118,674,660,000	118,674,660,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
Pendapatan Hibah	20,887,223,537	20,887,223,537
Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	9,900,146,278	9,900,146,278
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96,471,897,000	96,524,287,000
TOTAL BELANJA	801,845,673,202	811,402,322,048
BELANJA TIDAK LANGSUNG	44,693,033,858,820	451,572,328,588
Belanja Pegawai	278,627,760,271	281,646,360,271
Belanja Hibah	6,880,000,000	8,431,000,000
Belanja Bantuan Sosial	14,474,933,417	13,656,500,000
Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	145,447,644,900	146,338,468,317
Belanja tidak terduga	1,500,000,000	1,500,000,000
BELANJA LANGSUNG	354,915,334,613	359,829,993,460
Belanja Pegawai	36,215,101,957	36,843,717,207
Belanja Barang dan Jasa	112,139,764,503	123,154,025,030
Belanja Modal	206,560,468,153	199,832,251,223
SURPLUS/DEFISIT	-29,171,809,792	-38,676,068,638
PEMBIAYAAN DAERAH	29,171,809,792	38,676,068,638
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	29,171,809,792	38,676,068,638
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29,171,809,792	38,676,068,638
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	-	-

2. Adanya SILPA tahun 2017 yang harus digunakan

Dari hasil perhitungan penggunaan anggaran tahun 2017 terdapat SILPA (*unaudited*) sebesar Rp. 38,676,068,638,- yang harus direncanakan kembali penggunaannya. Secara ketentuan penggunaan dana SILPA berdasarkan sumber SILPA berkenaan yang melampaui penerimaan pendapatan (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah), sisa penghematan belanja , kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan dan kegiatan lanjutan. Penggunaan SILPA memperhitungkan potensi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran yaitu dengan mengurangi SILPA dengan pengeluaran wajib kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum diselesaikan , dan kegiatan lanjutan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pemerintah

Pemerintah Daerah Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2021, yang menekankan pada pemantapan pencapaian 95 indikator Pemerintah, untuk mencapai Visi. **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMERINTAH BERKELANJUTAN”** Untuk mempercepat pencapaian Visi tersebut di atas, ditetapkan 7 misi Pemerintah yang memiliki tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Ngada tahun 2018 yang dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngada

Misi	Tujuan	Sasaran
“Terwujudnya Masyarakat Ngada Dengan Taraf Hidup Yang Berkualitas, Mandiri, Berbudaya, Unggul, Dan Sejahtera Berlandaskan Etos Kerja Yang Tinggi Dan Pemerintah Berkelanjutan”.		
1. Melanjutkan dan mempercepat Pemerintah infrastruktur (jalan, air dan listrik) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan.	1.1 Melanjutkan dan mempercepat Pemerintah infrastruktur (jalan, air dan listrik) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan.	1.1.1 Berkurangnya waktu tempuh perjalanan dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal jalan.
		1.1.2 Terbukanya akses transportasi dari dan menuju wilayah-wilayah potensial
	1.2 Menyediakan kebutuhan pelayanan dasar berupa listrik, air dan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Ngada	1.2.1 Tersedianya kebutuhan listrik di semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada
		1.2.2 Tersedianya kebutuhan air di semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada
		1.2.3 Tersedianya kebutuhan rumah layak huni pada semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada

2. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.	2.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sektor pertanian dengan	2.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sector pertanian (tanaman pangan: padi,jagung, kedelai; perkebunan: kopi; dan peternakan :sapi, kambing, babi)
		2.1.2 Meningkatnya Keberagaman Produk Sektor Pertanian
		2.1.3 Meningkatnya Pengelolaan Destinasi dan Diversifikasi Produk Wisata
3. Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan	2.2 Menciptakan system tataniaga	2.2.1 Teraturnya kegiatan perniagaan
	3.1 Mewujudkan kota yang tertata rapih, indah dan nyaman sesuai daya dukung dan daya tampung	3.1.1 Tertatanya lingkungan permukiman, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota
	3.2 Meningkatkan Kemampuan Usaha Ekonomi Masyarakat Perkotaan	3.1.2 Terwujudnya penataan sistem transportasi publik yang nyaman
		3.2.1 Meningkatnya Skala Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan
4. Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.	4.1 Mewujudkan Pendidikan yang merata, terjangkau dan unggul	4.1.1 Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar
		4.1.2 Meningkatnya kualitas siswa dan tenaga pendidik
	4.2 Mendukung terwujudnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	4.2.1 Meningkatnya jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan Perguruan tinggi
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia	5.1 Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat	5.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		5.1.2 Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan
		5.1.3 Meningkatnya kualitas keluarga
6. Menanggulangi bencana alam,	6.1 Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam	6.1.1 Terpenuhi hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan Bencana Non Alam

non alam, dan atau bencana social serta memperkuat kapasitas kelembagaan social, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat;	6.2 Pengurangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	6.2.1 Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
	6.3 Peningkatan Kemitraan Kelembagaan Sosial, Politik, Budaya dan Keagamaan	6.3.1 Terjalannya Kemitraan yang harmonis
	6.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang terintegrasi (inhal) Bagi Masyarakat	6.4.1 Tersedianya Sarana Olah Raga dan Rung Publik Bagi Masyarakat
7. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	7.1 Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		7.1.2 Meningkatnya sistem birokrasi yang efisien, efektif dan ekonomis
		7.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Birokrasi
		7.1.4 Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

4.2. Prioritas Pemerintah Tahun 2018.

Prioritas dan sasaran Pemerintah merupakan suatu program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama karena program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran tiap tahun program prioritas Pemerintah di RPJMD untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah. Prioritas Pemerintah berisikan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik dan prioritas PD (terpilih) yang paling tinggi hubungannya (leading indicators) bagi target sasaran Pemerintah daerah pada tahun rencana. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas Pemerintah daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas Pemerintah dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Prioritas dan sasaran Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2018 dirumuskan berdasarkan telaahan kebijakan Pemerintah nasional (RKP 2018) dan provinsi NTT, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai tahun 2017 dan perkiraan capaian sampai Tahun 2018 (referensi Bab II), dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan (referensi bab III). Selain itu memperhatikan usulan PD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2018.

4.2.1 Kebijakan Pemerintah Nasional Tahun 2018

Tujuan Pemerintah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan Pemerintah, baik Pemerintah dalam skala nasional maupun skala daerah. Strategi Pemerintah yang digariskan dalam RPJMN 2015 - 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pemerintah Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita) :

- Cita 1:* Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2:* Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3:* Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negarakesatuan
- Cita 4:* Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5:* Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6:* Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7:* Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8:* Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9:* Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun prioritas Nasional Tahun 2018 untuk Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi Spatial yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan penurunan biaya logistik, diperlukan pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahan dan meningkatkan produktivitas daerah-daerah potensial terutama di Kawasan Timur (Sulawesi yang memiliki pertumbuhan >> rata-rata nasional) yang terintegrasi dengan tol laut sebagai tulang punggung distribusi logistic. Secara lebih terrinci pada tahun 2018 terlihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1
Program Prioritas Nasional 2018



4.2.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2018

Tujuan dan sasaran Pemerintah provinsi Tahun 2018 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”** Untuk mewujudkan visi Pemerintah tersebut maka ditetapkan 8 misi Pemerintah yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka keaja agenda Pemerintah yaitu:

- 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
- 2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- 4) Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;
- 5) Mempercepat Pemerintah infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- 7) Mempercepat Pemerintah Kelautan dan Perikanan;
- 8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

Lebih lanjut, kebijakan Pemerintah Provinsi NTT diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda, 6 (enam) tekad, serta 5 kebijakan khusus RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yaitu Revolusi KIA, Gong Belajar, Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Desa Wisata, P2LDT dan Penghijauan Berbasis Masyarakat. Keseluruhan agenda tersebut diatas dilaksanakan melalui 4 strategi Pemerintah NTT yaitu keterpaduan lintas sektor, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.

Secara rinci prioritas Pemerintah NTT 2018 difokuskan pada :

1. Pemerintah Infrastruktur yang diarahkan pada pengalihan sebagian ruas jalan provinsi, non status dan jalan kabupaten menjadi jalan strategis nasional.
2. Peningkatan Pelaksanaan 6 tekad Pemerintah melalui :
 - a. Pengembangan Jagung melalui penyediaan sumber air, alsintan dan saprodi,
 - b. Penyediaan ternak dan obat – obatan,
 - c. Penyediaan kapal dan alat tangkap,
 - d. Pelaksanaan event – event pariwisata,
 - e. Pengembangan cendana rakyat,
 - f. Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Koperasi.
3. Mendukung 5 program strategis nasional melalui :
 - a. Pengembangan pariwisata dengan Pusat KSPN Labuan Bajo,
 - b. Pemerintah Bendungan di wilayah Timor, Sumba dan Flores,
 - c. Pemerintah Segitiga pertumbuhan,
 - d. Pemerintah jembatan Pancasila Palmerah kerjasama RI dengan Belanda,
 - e. Pengembangan industri garam.
4. Mendukung program kemitraan lembaga internasional melalui :

- a. Percepatan pelaksanaan Sumba Iconic Island dan pengembangan cokelat di Flores,
- b. Peningkatan perluasan capaian target kerjasama Pemerintah dengan UNDP,
- c. Peningkatan Sinergitas Program Dukungan USAAID, UNICEF, PLAN International, WVI serta mitra lainnya.

4.2.3 Review Capaian RKPD Tahun 2018

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah ditahun sebelumnya ditemukan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan Pemerintah ditahun selanjutnya. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan Pemerintah, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Isu pengembangan wilayah yang belum memadai yang mencakup permasalahan :
 - Masih terjadi kesenjangan Pemerintah infrastruktur antara wilayah utara dan wilayah selatan Kabupaten Ngada.
 - Kualitas Infrastruktur (Jalan, listrik dan air) yang belum mencapai target karena keterbatasan anggaran.
 - Belum tertatanya secara baik drainase dan bahu jalan sesuai peruntukannya.
 - Belum tersedianya sarana dan prasarana jalan yang memadai sampai di daerah kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
 - Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan.
 - Belum semua masyarakat memiliki rumah layak huni.
- b. Isu pengembangan ekonomi yang mencakup permasalahan :
 - Masih rendahnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian.
 - Potensi pariwisata belum dikembangkan secara optimal yang ditandai dengan keterbatasan penyediaan sarana prasarana serta rendahnya jumlah kunjungan wisatawan.
 - Masih adanya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- c. Isu rendahnya daya saing masyarakat yang ditandai dengan permasalahan :
 - keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
 - Masih rendahnya tata kelola pendidikan yang tergambar dari belum meratanya penempatan guru di sekolah-sekolah.
 - belum meratanya kualitas profesional guru dan tenaga kependidikan serta masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan.
 - Belum optimalnya upaya promotif yang lebih menyeluruh dengan melibatkan sektor kesehatan, dan lintas sektor serta masyarakat sehingga perilaku hidup bersih dan sehat belum membudaya di dalam masyarakat.
- d. Isu kurang efektifnya tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan permasalahan :
 - Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - Masih belum optimalnya sistem pelayanan birokrasi yang efisien dan efektif.

4.2.4 Usulan SKPD dan Review Rancangan RKPD

Berdasarkan hasil telaahan Rancangan Renja terhadap Rancangan Awal RKPD ditemukan terdapat beberapa usulan kegiatan baru, sebagai implikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya usulan masyarakat melalui reses DPRD yang harus diakomodir, dengan tetap memperhatikan sinergi dan konsistensi dengan indikator RPJMD
2. Keseluruhan usulan baru diarahkan untuk tetap menjawab program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD (tidak ada tambahan program baru)
3. Terkait perubahan sebagaimana tersebut diatas berimplikasi pada penyesuaian perkiraan maju RKPD Tahun 2018.
4. Adanya isu – isu Pemerintah yang berkembang saat penyelenggaraan Musrenbang sebagai berikut :
 - a) Ruas Jalan Provinsi Poma-Riung diusulkan menjadi JALAN STRATEGIS PARIWISATA
 - b) Pemerintah Kelurahan :
 - Pemda mengalokasikan anggaran untuk Pemerintah sarpras dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
 - Alokasi anggaran tersebut dimasukan pada anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai peraturan perundangan.
 - Pemanfaatan anggaran kelurahan tersebut melalui Musrenbang Kelurahan
 - Ketentuan mengenai tatacara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Pemerintah dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah Pemerintah kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.
 - c) Pemerintah Sarana dan Prasarana yang terletak di wilayah irisan Perbatasan antar Kabupaten yang saat ini sedang dalam persoalan, agar DIHENTIKAN untuk sementara waktu sambil menunggu penyelesaian oleh Provinsi.
 - d) Perlu adanya alokasi anggaran untuk penanganan Pemerintah Sarana dan Prasarana lintas desa dan lintas kecamatan.
 - e) Penggunaan Kamus Musrenbang sebagai prakondisi pelaksanaan *e-Planning* sesuai rekomendasi KPK.
 - f) Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Sarana dan Prasarana di Kabupaten Ngada menggunakan pendekatan OUTCOME yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

Setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka dirumuskan prioritas dan sasaran Pemerintah berdasarkan ketersediaan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dirumuskan pada kerangka pendanaan yang sesuai dengan spirit “**Membangun Ngada Dari Desa**” dan Visi. “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMERINTAH BERKELANJUTAN**” maka rincian prioritas Pemerintah Kabupaten Ngada pada tahun 2018 dapat dirincikan sebagai berikut :
Misi 1 : Pemerintah Infrastruktur dasar wilayah untuk mengurangi disparitas wilayah, dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan jalan, listrik dan air. Dengan slogan “**Zala siro saro, Wae gebho gabho dan Dara rilo ralo**, Pemerintah Kabupaten Ngada berkomitmen untuk menjadikan jalan, listrik dan air sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Misi 1 RPJMD 2016 – 2021.

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
WAE GEBHO GABHO	66,22 %	86,5%	6,76 % /Th
	11.931 KK	30.551 KK	4.678 KK/Th
ZALA SIRO SARO	466,74 Km	806 Km	150 Km/Th
DARA RILO RALO	72,03 %	87%	5,59 % /Th
	25.050 RT	30.257 RT	1.946 RT/Th

Misi 2 : Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bertumpu pada sector pertanian, agrobisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan. Misi 2 lebih diprioritaskan pada **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK)** pada beberapa komoditi unggulan seperti Kopi, Padi, Holtikultura dan Ternak Sapi, Kuda dan Babi

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
PERAK PETERNAKAN	28.186 Ekor	32.275 Ekor/Th	1.363 Ekor/Th
PERAK HORTIKULTURA	n.a	71 Ha	10 Ha/Th
PERAK KOPI	6.356,6 Ha	200 Ha	100 Ha/Th
PRODUKTIVITAS PADI	3,8 Ton/Ha	7,12 Ton/Ha	1,44 Ton/Ha

Misi 3 : Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan serta menjunjung tinggi penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi 3 lebih difokuskan pada penataan perkotaan dengan focus utama penataan dan pengembangan kota Bajawa.

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
KEKUMUHAN	27 Ha/1396 Ha	0,93%	0,5%/Th
TITIK GENANGAN	115 Titik	69 Titik	23Titik
PERSAMPAHAN (TPST)	15.552 kubik	30%	10%
ANGKUTAN KOTA	1086 Plgrn	23%	11,5 %

Misi 4 : Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi. Misi 4 diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan distribusi tenaga pendidik dan pembiayaan honor tenaga pendidik.

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
APM (SD/SMP) %	86,15 / 57,7	100 / 68,86	2,77 / 4,47 / TH
APK (SD/SMP) THN %	100,86 / 86,46	100 / 93,26	0 / 2,71 / ThH
ANGKA HARAPAN SEKOLAH	11,99 TH	12,41 TH	0,07 TH
RATA LAMA SEKOLAH	7,51 TH	8 TH	0,30 TH
Uji Kompetensi Guru	5,0	6,0	0,5

Misi 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Misi 5 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan dengan menggunakan strategi lintas sumber pendanaan.

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
ANGKA HARAPAN HIDUP	67,32 TH	67,62TH	0,14 TH/TH
KEMATIAN BAYI	45 KASUS	30 KASUS	5 KASUS/TH
CAKUPAN PELAYANAN RUJUKAN MASY. MISKIN	4,2 %	2,98 %	0,4 %/TH
RASIO DOKTER	24%	15%	2,2 %/TH
DESA/KEL STBM	79 DS/KEL	96 DS/KEL	15 DS/KEL/TH
CAKUPAN KB AKTIF	52,18%/9.247	57,46%	4,6%/2.155

Misi 6 : Penanggulangan bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan, dan olahraga di masyarakat. Misi ini difokuskan untuk menjamin ketentraman, keamanan dan perlindungan masyarakat dengan focus utama penanganan PMKS dan korban bencana.

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
PMKS TERTANGANI	46%	61%	4%
PENANGANAN BENCANA	100%	100%	100%/TH

Misi 7 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Fokus misi ini adalah peningkatan kualitas SDM aparatur, perencanaan dan pengelolaan Anggaran yang berbasis Technology Infomasi (*e planning*, *e budgeting*, dan *e procurement*).

Prioritas	2015	Target 2018	Pertahun
KONSISTENSI RKPD/RPJMD	92,18 %	100%	
KONSISTENSI APBD/RKPD	82,8 %	100%	
OPINI BPK (SKALA)	WDP	WTP	-
EVALUASI LKJIP	SKALA "C"	SKALA "B"	-
SCORE LPPD	20054 TGGI	28000 TGGI	
SISTEM ONLINE	6 SKPD	10 SKPD	1 SKPD/TH

Adapun Program prioritas untuk mendukung pencapai visi dan misi RPJMD 2016 – 2021 pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Prioritas Pemerintah, Sasaran, Indikator Kinerja, Target Tahun 2018, Kategori dan SKPD Penanggungjawab

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Misi Pertama: Melanjutkan dan mempercepat Pemerintah infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan</p>										
<p>1. Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik</p>										
a	Berkurangnya waktu tempuh perjalanan dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Peningkatan jalan dan jembatan yang dapat mempercepat Pemerintah aksesibilitas wilayah, terutama pada	Pemerintah Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten	Km	466.74	506,74	806	Dinas PUPR

	publik sesuai standar pelayanan minimal jalan.		Ruas Jalan lingkaran luar wilayah kabupaten Ngada, sentra-sentra Produksi, Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru dan Wilayah Potensial							
b	Terbukanya akses transportasi dari dan menuju wilayah-wilayah potensial	Membuka jaringan jalan baru dari dan menuju wilayah potensial	Pemerintah jalan dan jembatan yang dapat mempercepat Pemerintah aksesibilitas wilayah, terutama pada	Meningkatnya aksesibilitas	Persentase	89,73	89,73	95,73		Dinas PUPR

			Ruas Jalan lingkar luar wilayah kabupaten Ngada, sentra-sentra Produksi, Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru dan Wilayah Potensial							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Menyediakan kebutuhan pelayanan dasar berupa listrik, air dan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Ngada

a	Tersedianya kebutuhan listrik di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Meningkatkan dan memperluas Pembangkit & jaringan listrik di seluruh wilayah Kabupaten	Membangun Pembangkit dan Jaringan listrik untuk seluruh wilayah Kabupaten Ngada melalui subsidi ke	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tangga yang terlayani listrik	Persentase	72.03	77	92	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
---	---	---	---	---	---	------------	-------	----	----	---

		Ngada	Perusahaan							
			Pemasangan Instalasi Listik Perumahan bagi masyarakat Kabupaten Ngada							
b	Tersedianya kebutuhan air di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Peningkatan dan perluasan jaringan air di seluruh wilayah Kabupaten Ngada	Peningkatan dan perluasan saluran jaringan air minum bersih pada semua desa dan dusun baik dengan menggunakan system gravitasi, pompa hydram	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase KK yang telah terlayani air bersih	Persentase	66.22	72.98	86.5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

			dan sumur bor .							
			Peremajaan jaringan pipa distribusi dan transmisi di kota Bajawa.							
			Pemerintah waduk, embung dan jebakan air pada daerah-daerah mata air yang mengalami penurunan debit untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan	Program Pemerintah, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun	Unit	0	0	1	Dinas PUPR
				Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya	Prosentase Cakupan Konservasi Wilayah	Persentase	44.6	55	76.6	Dinas Lingkungan Hidup

			pertanian.	Alam	Sumber Mata Air , Lahan Kritis dan Rawan abrasi					
		Revitalisasi pengelolaan jaringan air bersih pedesaan	Penguatan manajemen pengelolaan air bersih pedesaan	Program Peningkatan partisipasi masyarakat Dalam membangun Desa	Jumlah SPAM Perdesaan yang dibina	Desa	106	151	?	Dinas PMD P3A
c	Tersedianya kebutuhan rumah layak huni di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pemberian bantuan perbaikan kualitas rumah	Program Lingkungan sehat Perumahan	Berkurangnya Persentase rumah tdk layak huni	Persentase	na	0	10	Dinas PUPR

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJM D	Target Awal RPJM D Tahun 2017	Target RPJM D Tahun 2018	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Misi 2 : Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sector pertanian (Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedelai. Tanaman Perkebunan : Kopi, Peternakan : Sapi, Kambing, Babi

a.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sector pertanian	Intensifikasi lahan sector pertanian	Optimalisasi lahan pertanian	Peningkatan Ketahanan pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan	persen	100			Dinas Pertanian
			Peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat;		Peningkatan Produktifitas tanaman Pangan dan Perkebunan					
			Pencegahan penanggulangan		Tanaman Pangan :					

		gan hama tanaman							
		Penyuluhan Pertanian		<i>Padi</i>	<i>Ton/Ha</i>	<i>3.8</i>	<i>3.8</i>	<i>7.12</i>	
				<i>Jagung</i>	<i>Ton/Ha</i>	<i>3.6</i>	<i>2.5</i>	<i>3.9</i>	
				<i>Kedele</i>	<i>Ton/Ha</i>	<i>2.85</i>	<i>2.85</i>	<i>2.95</i>	
				<i>Kacang Merah</i>	<i>Ton</i>	<i>1751</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	
				Tanaman Perkebunan:					
				<i>Kopi</i>	<i>Ton/Ha</i>	<i>0.82</i>	<i>0.86</i>		
		Pengairan Yang Teratur	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang Jaringan Irigasi yang dalam Kondisi Baik	Meter	33.513	40.513	54.513	Dinas PUPR
		Pemanfaatan teknologi pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Meningkatnya Usaha-usaha pertanian yang menerapkan teknologi	Ha	0	100	100	Dinas Pertanian

				pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas Pertanian/Perkebunan					
		Fasilitasi akses permodalan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan modal dari perbankan	UPH	0	0	6	Dinas Pertanian
	Ekstensifikasi lahan pertanian	Pencetakan dan perluasan lahan produksi baru	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Adanya Perluasan Areal tanam untuk tanaman Pangan dan Perkebunan					Dinas Pertanian
		Pengembangan irigasi		Tanaman Pangan:					
		Pemberdaya		<i>Padi sawah</i>	<i>Ha</i>	6,413	6,413	6.713	

		an Ekonomi rakyat (Perak) Sektor Pertanian	<i>Jagung</i>	<i>Ha</i>	12,469	12.789	13.429
			<i>Kedele</i>	<i>Ha</i>	652	972	1612
			Tanaman Perkebunan:				
			<i>kopi</i>	<i>Ha</i>	6356.6	6456.6	6656.6
			Adanya peremajaan tanaman kopi	<i>Ha</i>	381.97	481.97	681.97
			Adanya peningkatan produksi tanaman Pangan dan Perkebunan	<i>Ton/Ta hun</i>			
			Tanaman Pangan:				
			<i>Padi</i>	<i>Ton/Tab un</i>	45,893	57.288	83.198
			<i>Jagung</i>	<i>Ton/Tab un</i>	44,857	47.319, 3	49.877, 1
			<i>Kedele</i>	<i>Ton/Tab</i>	1,857	2.818,8	2916

					Tersedianya Tatakelola MPIG sebagai Institusi pemegang hak indikasi Geografis	Paket Pelatihan	0	0	1	
b	Meningkatnya keberagaman produk sector pertanian	Pengolahan Hasil Pertanian	Pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Presentase produksi kelapa olahan (Jumlah Kelapa Olahan/Jumlah Produksi * 100)	Persen	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan
						Persentase produksi pisang olahan (Jumlah Pisang Olahan/Jumlah Produksi * 100)	Persen	0	0	
			Peningkatan kapasitas	Program Peningkatan Kesejaht	Jumlah Gabungan	Kelompok Tani	0	100	300	Dinas Ketahanan

			SDM sektor pengolahan hasil pertanian	eraan Petani	kelompok tani pelaku agribisnis yang terlatih					an Pangan
			Pengembangan sistem agribisnis sektor pertanian							
			Pengembangan pangan lokal							
c	Meningkatnya Pengelolaan destinasi dan diversifikasi produk wisata	Menata destinasi wisata	Penataan sarana dan prasarana wisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di lokasi daya tarik destinasi wisata utama	lokasi	1	2	6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pemberdayaan	Program Pengembangan	Meningkatnya kemitraan	Lembaga	2	2	6	

			masyarakat pelaku pariwisata	Kemitraan	Promosi Pariwisata					
		Mengembangkan promosi pariwisata	Membangun kemitraan Pemerintah, swasta dan masyarakat							
			Penyelenggaraan event - event pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya penyelenggaraan even-even pariwisata	even	5	6	8	
			Diversifikasi produk wisata		Meningkatnya jenis souvenir	Jenis	5	6	8	
d	Meningkatkan dan Mempertahankan Keberagaman Flora	Membangun Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat	Menyediakan Master Plan dan Perencanaan Teknis Pemerintah	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Tersedianya Dokumen Master Plan dan Perencanaan Teknis Pemerintah	Dokumen	0	0	1	BP Litbang

			Kebun Raya Wolobobo		Kebun Raya Wolobobo					
2 :Menciptakan sistem tataniaga pasar										
a.	Teraturnya kegiatan perniagaan atau perdagangan	Menyediakan regulasi yang mengatur tentang sistem tataniaga	Perwujudan kepastian hukum	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Penataan Distribusi Barang dan Jasa	Paket	0	0	0	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Misi 3 : Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan.

1. Mewujudkan kota yang tertata rapih, indah dan nyaman sesuai daya dukung dan daya tampung

a	Tertatanya lingkungan permukiman, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten	Penyusunan instrumen perencanaan, pengawasan & pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen Penataan Ruang Kota	Dokumen	1 dokumen dari 13 dokumen	3	4	Dinas PUPR dan BP Litbang
---	--	---	--	--------------------------------	---	---------	---------------------------	---	---	---------------------------

	Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang,	Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang		Tersedianya Perda Penataan Ruang Kota	Perda	1 Perda dari 13 Perda	1	1	Dinas PUPR dan BP Litbang
	Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman,	Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	Program Lingkungan sehat perumahan	Persentase Daerah permukiman kumuh	Persentase	1.93	1.93	0.93	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Program Pemerintah Saluran/Drainase dan Gorong-gorong			Jumlah Titik - titik genangan dalam kota yang terselesaikan	Lokasi	115	23	69	Dinas PUPR	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			Prosentase Pelayanan Pengangkutan Sampah	Persentase	66.10%	84,9	100	BLHD	
			Persentase sampah yang	Persentase	10	20	30	BLHD	

					diolah pada TPST					
b	Terwujudnya penataan sistem transportasi publik yang nyaman	Tersedia prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Penataan Angkutan Umum	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase kendaraan layak operasi	Persentase	na	100	100	Dinas Perhubungan
			Meningkatkan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Tersedianya trayek angkutan dalam kota bajawa	jumlah trayek	2	2	6	Dinas Perhubungan

2. Meningkatkan Kemampuan usaha ekonomi masyarakat Perkotaan

a	Meningkatnya Skala Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan	Pemberdayaan UMKM	Penguatan Manajemen Usaha	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan	Persentase	7,46 % (dari 2.146 UMKM)	12,46 % (dari 2.316 UMKM)	30.46	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Penguatan Modal Usaha							

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Misi 4 : Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.											
1. Mewujudkan Pendidikan yang merata, terjangkau dan unggul											
	Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar	Meningkatkan Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	Penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Program Pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi murni TKK/PAUD	Prosentase	na	43,55	46.89	Dinas Pendidikan	
				Anak Usia Dini	Meningkatnya angka partisipasi Kasar TKK/PAUD	Prosentase	na	45,84	45.72		
			Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOSDIK) mulai dari Tingkat PAUD sampai SMA	Meningkatnya angka partisipasi murni	Prosentase	na				
					SD			86.15	100		100
					SMP			57.7	57.7		68.86
			Meningkatnya angka partisipasi Kasar	Prosentase							

					<i>SD</i>		<i>100.86</i>	<i>100</i>	100	
					<i>SMP</i>		<i>86.46</i>	<i>86.46</i>	93.26	
Meningkatnya kualitas Siswa	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi tenaga pendidik	Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar nasional	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Rata-Rata nilai Uji Kompetensi Guru	Rata – rata Nilai	4	5,0	6	Dinas Pendidikan	
		Pengembangan kurikulum serta kualitas materi dan metode pembelajaran;		Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SD	Rata-rata Nilai	na	6,6	6,8		
				Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SMP	Rata-rata Nilai	na	6,6	6,8		
	Pelibatan Masyarakat dalam menunjang kualitas pendidikan	Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan								
2. Mendukung terwujudnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi										

Meningkatkan jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan sekolah tinggi	Peningkatan kesempatan dan kemudahan mendapatkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa	Belanja Tidak Langsung (PPKAD)	Jumlah Mahasiswa yang mendapat Bantuan	Jumlah Orang	2000	0	0	Badan Keuangan
		Meningkatan Koordinasi dengan Undana dan Pemerintah Pusat untuk pendirian Universitas	Belanja Tidak Langsung (PPKAD)	Jumlah Hibah Pemda	Rupiah	0	1.700.000.000	0	
		Fasilitasi Penyediaan Tenaga Dosen melalui Beasiswa Tenaga Potensial	(Bansos)	Jumlah Tenaga Dosen	Orang	123	0	0	
		Fasilitasi penyediaan lahan	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Aset Bidang Tanah	Bidang	1	0	0	

		Meningkatnya jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan Perguruan tinggi	Meningkatnya persentase penduduk dengan ijazah tertinggi SMA		Persentase	10.74	10.74	12.74
			Meningkatnya persentase Penduduk dengan ijazah tertinggi Perguruan tinggi		Persentase	7.54	7.54	9.54

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
Misi Kelima: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia.										
1. Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat										
a	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas	Peningkatan sarana, prasarana dan manajemen puskesmas serta Rumah Sakit	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	Terpenuhinya obat dan perbekalan di sarana kesehatan (Jumlah/jenis obat yang tersedia/jumlah obat yang dibutuhkan x 100)	Persen	95,43	96.34	98.17	Dinas Kesehatan
				Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskes	Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar (jumlah sarana					Dinas Kesehatan

			mas Pembantu dan jaringannya	yang sesuai standar/total jumlah sarana x100)					
				Puskesmas	Buah	14	14	17	
				Pustu	buah	24	24	28	
				Pusling	Buah	11	16	20	
			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar/terkalibrasi (jumlah sarana yang sesuai standar/total jumlah sarana x100)	Persen	0	0	0	Dinas Kesehatan
		Dukungan Pemerintah RS Baru sebagai Pusat	Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana	Presentase ketersediaan Sarana Pendukung Pemerintah	Persen	0	0	75	Dinas Kesehatan

		Rujukan di Flores	RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata	RSUD (jumlah ketersediaan sarana pendukung/Total Srana Pendukung)X100					
		Meningkatkan pelayanan UPT Puskesmas dan RSUD	Program upaya Kesehatan masyarakat	Meningkatnya penanganan dan pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan dasar:					
		Pemberian Biaya Operasional Kesehatan Daerah (BOKDA)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat jalan	Persen	16.31	16,31	15.65	Dinas KEsehatan
				-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat inap	Persen	0.42	0,42	0.85	Dinas KEsehatan
				-Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD, SMP, SMA dan setingkat	Persen	90,09	92,07	96.04	Dinas Kesehat an

					-Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan di Sarana Kesehatan	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan
					-Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	Persen	103.7	100	100	Dinas Kesehatan
					- Cakupan Rujukan Masyarakat Miskin	Persen	4.14	3.75	2.98	Dinas Kesehatan
					• BOR (Bed Occupancy Rate yaitu prosentase pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 65% -	Persen	62,59	63,7	65.92	RSUD

				85%)					
				<ul style="list-style-type: none"> • LOS (Length of Stay adalah rata-rata lamanya pasien dirawat dengan nilai optimal 3 – 6 hari) 	Hari	3.48	6	6	RSUD
				<ul style="list-style-type: none"> • TOI (Turn Over Interval adalah selang waktu pemakaian tempat tidur dari pasien yang satu ke pasien berikutnya dengan nilai optimal 1–3 hari) 	hari	2.07	1,97	1.67	RSUD
				<ul style="list-style-type: none"> • BTO (Bed Turn Over adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun 	kali	65.83	62,36	55.42	RSUD

				waktu tertentu dengan nilai optimal 40-50 kali dalam setahun)					
				-GDR (Gross Death Rate / Angka Kematian Kasar adalah rata-rata angka kematian dalam kurun waktu tertentu)	Persen	28,800/1000	28,300/1000	27.120/1000	RSUD
				• NDR (Net Death Rate adalah angka kematian pasien dalam perawatan kurang dari 48 jam)	Persen	17,48/1000	16,99/1000	16,55/1000	RSUD
				Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar/terkalib	Persen	89.2	89.2	94.64	Dinas Kesehatan

				rasi (jumlah sarana yang sesuai standar/Total jumlah sarana x 100)					
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Menurunkan Kasus kematian Ibu	Kasus	3	4	2	Dinas Kesehatan
				Menurunkan Kasus kematian Bayi	Kasus	51	40	30	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunkan Kasus Kematian Anak	Kasus	54	47	34	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan rujukan masyarakat Ngada	Persen	4,20	3,80	3	Dinas Kesehatan
		Peningkata							

			n Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN)							
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase SDM yang memenuhi standar (Jumlah SDM sesuai standar minimal/Total SDM yang adax100)	Persen	5.1	24,08	62.04	Dinas Kesehatan dan RSUD
			Pemberian Biaya Operasional Kesehatan Daerah							
b	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui	Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan	Meningkatkan promosi kesehatan Puskesmas	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga BerPHBS (Jumlah Rumah Tangga berPHBS/Total Rumah TanggaX100)	Persen	70.86	73,86	79.86	Dinas Kesehatan

	promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan		Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan BerSTBM	Persen	24	38	96	Dinas Kesehatan
c	Meningkatkan kualitas keluarga	Peningkatan Kelestarian dan kemandirian peserta KB	Peningkatan cakupan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Program Keluarga Berencana	Prosentase KB Aktif (Jumlah Peserta KB Aktif/Total PUSX100)	Persen	46.18	49,3	55,7	Dinas KCS

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2017	Target RPJMD Tahun 2018	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi Keenam : Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana social serta memperkuat kapasitas kelembagaan social, ekonomi, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat										
1. Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam										
a	Terpenuhinya hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan Bencana Non Alam	Melakukan Pemetaan terhadap daerah rawan bencana alam dan bencana non Alam	Peningkatan Kapasitas dan Komptensi aparatur dalam melakukan survey dan identifikasi daerah rawan bencana	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Bencana Alam	Persentase Bencana Alam yang ditangani	Bencana	100	100	100	BPBD

Membangun Pola Kemitraan bersama masyarakat dan swasta dalam Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam	Penyediaan Prosedur Tetap Penanganan Bencana Alam dan Bencana Non Alam		Persentase Bencana Non Alam yang ditangani	Bencana	100	100	100	BPBD
	Sistem Peringatan Dini dan mitigasi Bencana Alam dan Bencana Non Alam							
	Rekonstruksi dan Rehabilitasi Korban Bencana Alam dan Bencana non Alam							

2. Pengurangan Masalah Kesejahteraan Sosial

a	Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial	1.Membangun Kemitraan dengan Masyarakat dan Swasta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase penduduk miskin yang memperoleh bantuan	Persen	52	56,24	64.24	Dinas Sosnaketrans
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	persen	25	37	61	Dinas Sosnaketrans
3. Peningkatan Kemitraan Kelembagaan Sosial, Politik, Budaya dan keagamaan										

a	Terjalannya Kemitraan yang Harmonis	Membangun Kerjasama Antar Kelembagaan	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase	100	100	100	Kesbangpolinmas
				Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terjalannya Kerjasama Penelitian Bidang Kebudayaan	Unit	30	30	30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase	80	80	80	Kesbangpolinmas

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terintegrasi (Inhall)

a	Memasyarakatkan Olah raga dan Mengolahragakan masyarakat	Membangun Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Penyediaan Master Plan dan Perencanaan Teknis Sport Center	Program Pemerintah Sarana dan Prasarana Olah Raga	Tersedianya Master Plan dan Perencanaan Teknis Pemerintah Sport Center	Dokumen	0	2	0	Dinas PUPR
---	--	--	--	---	--	---------	---	---	----------	------------

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJM D	Target Awal RPJM D Tahun 2017	Target RPJM D Tahun 2018	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Misi Ketujuh: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat

1. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan

	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Daerah	Program Pendidikan Kedinasan	Berkurangnya Jumlah Aparatur Pemerintahan Daerah yang belum mengikuti Diklat Kepmimpinan	Jumlah Orang	341	308	242	BK Diklat
			Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan	Jumlah Orang	123	133	153	BK Diklat

		Pemerintahan Daerah		Daerah melalui Jenjang Pendidikan Formal					
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Umum	Tersedianya Fasilitas Perkantoran yang memadai bagi penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	berkurangnya sarana dan prasarana Pemerintahan yang tidak memadai	unit	5	4		Dinas PUPR
	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Pembentukan Regulasi terkait Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya pemerintahan daerah melalui penataan organisasi perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah	34	56	56	Bagian Organisasi

Meningkatnya sistem birokrasi yang efisien, efektif dan ekonomis	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik	Penyediaan Sumber daya Manusia, Perangkat keras dan perangkat lunak dalam pelayanan perijinan kepada masyarakat	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tertatanya sistem Perijinan yang terpadu	Persen	0	0	0	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Satu atap
		Penerapan <i>E-Planning</i> dalam Proses Perencanaan Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi Daerah	Tersedianya Sistem Informasi perencanaan Pemerintah daerah	Sistem	0	0	1	BP Litbang
		Pengembangan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	0	100	100	Adm Pemerintah

			Pemerintah dan Penerapan E-Payment dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Tertatanya sistem Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah	Persen	0	0	100	Badan keuangan
			Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tertatanya Sistem Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat	Persen	0	0	0	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Fungsi-Fungsi Koordinasi baik lintas sektor maupun lintas sumber dana	Membangun Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Sumber Dana dalam Pemerintah Daerah	Program Kerja Sama Pemerintah	Terlaksananya Koodinasi Lintas Sektor dan Lintas Sumber Dana Dalam Pemerintah Daerah	kali	2	2	4	BP Litbang

		Mewujudkan Integrasi/Konektivitas Data melalui pengelolaan satu data Pemerintah	Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Pengembangan Data dan Informasi	Meningkatnya Keterisian data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persen (Keterisian data SKPD/Jumlah Elemen Data Lingkup Kabupaten) x 100 %	40,18	52,8	78,2	BP Litbang
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Birokrasi	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset daerah	Penguatan Sistem Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan sistim pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	Skala	WDP	WDP	WTP	Inspektorat
		Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah temuan	1.160 Temuan	232	696	Inspektorat

				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase	43,93 % dari Target Nilai 32000	62,67	87.5	Administrasi Pemerintahan Umum
					Meningkatnya Nilai Evaluasi LKJIP Skala Nasional	Skala	C	CC	B	Bagian Organisasi
Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Pemekaran Wilayah	Pemekaran Kecamatan	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Terbentuknya Daerah otonom Baru Desa / Kelurahan	Desa/Kel	151	151	151	Dinas PMD P3A	
		Pemekaran Wilayah Kabupaten menjadi daerah Otonom Baru		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Provinsi	Persentase	33.33%	33,33%	33,33	Adm Pemerintahan	

			0		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kabupaten	Persentase	0	0	75	Adm Pemerintah an
					Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan	Persentase	0%	0	75	Adm Pemerintah an

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2018, antara lain memuat kegiatan lanjutan sebelumnya, pergeseran kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai alokasi anggaran yang ada.

Secara rinci Perubahan Program dan Kegiatan disajikan pada Lampiran Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam RKPD Perubahan Kabupaten Ngada Tahun 2018 :

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2018 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada untuk Tahun Anggaran 2018. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Ngada Tahun 2018. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) menyusun Perubahan Renja dan RKA PD.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penjabarannya memerlukan langkah-langkah taktis strategis, yang dituangkan dalam kaidah pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :

- 1) Perlunya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam RKPD dan Perubahanannya, sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran Pemerintah yang ditetapkan;
- 2) Sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD, Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 ini selanjutnya perlu dijabarkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ngada tahun 2018;
- 3) Perubahan RPKD Kabupaten Ngada Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.

Harapan kedepan agar Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 ini, menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pelaku Pemerintah di Kabupaten Ngada dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 27 Juli 2018

PAULUS SOLIWOA
PAULUS SOLIWOA

PAULUS SOLIWOA

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN

NO MO R	URUSAN/ BIDANG, URUSAN DAERAH DAN PROGRA M/KEGIA TAN	L O K A S I		INDIKATOR KINERJA								KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RKPD 2018)	PAGU PENETAPAN APBD 2018	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG
				HASIL PROGRAM				KELUARAN KEGIATAN							
				TOLAK UKUR		TARGET		TOLAK UKUR		TARGET					
		SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Program Pelayanan Administra si Perkantora n			Meningkat nya kualitas pelayanan administra si perkantora n	Meningkat nya kualitas pelayanan administra si perkantora n	12 Bulan	12 Bulan					1,174,041,000	2,535,612,836	2,411,412,836	-124,200,000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BAJAWA	BAJAWA					Surat masuk dan surat keluar	Surat masuk dan surat keluar	12 Bulan	12 Bulan	800,000	3,920,000.00	3,920,000.00	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BAJAWA	BAJAWA					Komunikasi , listrik dan air	Komunikasi , listrik dan air	12 Bulan	12 Bulan	16,000,000	16,200,000.00	9,300,000.00	(6,900,000)
3	Penyediaan jasa pemeliharaa n dan perizinan kendaraan dinas/opera sional	BAJAWA	BAJAWA					Mobil dan motor dinas	Mobil dan motor dinas	12 Bulan	12 Bulan	175,540,000	171,035,000.00	171,035,000.00	-
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BAJAWA	BAJAWA					SPP/SPM BTL dan BL SKPD	SPP/SPM BTL dan BL SKPD	12 Bulan	12 Bulan	236,041,000	392,485,500.00	392,485,500.00	-
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BAJAWA	BAJAWA					Kebersihan kantor	Kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	4,053,336.00	4,053,336.00	-

NO MO R	URUSAN/ BIDANG, URUSAN DAERAH DAN PROGRA M/KEGIA TAN	L O K A S I		INDIKATOR KINERJA								KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RKPD 2018)	PAGU PENETAPAN APBD 2018	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG
				HASIL PROGRAM				KELUARAN KEGIATAN							
				TOLAK UKUR		TARGET		TOLAK UKUR		TARGET					
		SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN						
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BAJAWA	BAJAWA					Sarana kerja	Sarana kerja	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	6,000,000.00	6,000,000.00	-
7	Penyediaan alat tulis kantor	BAJAWA	BAJAWA					ATK	ATK	12 Bulan	12 Bulan	95,000,000	109,089,000.00	109,089,000.00	-
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BAJAWA	BAJAWA					Cetak, penggandaan dan penjilidan	Cetak, penggandaan dan penjilidan	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	59,750,000.00	59,750,000.00	-
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BAJAWA	BAJAWA					Instalasi listrik kantor	Instalasi listrik kantor	12 Bulan	12 Bulan	2,500,000	2,500,000.00	2,500,000.00	-
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BAJAWA	BAJAWA					Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	68,340,000.00	42,040,000.00	(26,300,000)
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BAJAWA	BAJAWA					Buku peraturan dan SOP	Buku peraturan dan SOP	12 Bulan	12 Bulan	2,000,000	0.00	0.00	-
12	Penyediaan makanan dan minuman	BAJAWA	BAJAWA					Makan dan minuman harian, tamu dan kegiatan	Makan dan minuman harian, tamu dan kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	136,160,000	112,000,000.00	132,000,000.00	20,000,000

NO MO R	URUSAN/ BIDANG, URUSAN DAERAH DAN PROGRA M/KEGIA TAN	L O K A S I		INDIKATOR KINERJA								KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RKPD 2018)	PAGU PENETAPAN APBD 2018	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG
				HASIL PROGRAM				KELUARAN KEGIATAN							
				TOLAK UKUR		TARGET		TOLAK UKUR		TARGET					
		SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN						
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BAJAWA	BAJAWA					Koordinasi luar daerah	Koordinasi luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	225,000,000	105,940,000.00	455,940,000.00	350,000,000
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	BAJAWA	BAJAWA					Koordinasi dalam daerah	Koordinasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	175,000,000	1,484,300,000.00	1,023,300,000.00	(461,000,000)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BAJAWA	BAJAWA	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan					100%	100%	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BAJAWA	BAJAWA					Gedung kantor	Gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	15,000,000	15,000,000.00	-
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BAJAWA	BAJAWA	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi aparatur sehingga dapat berperan lebih optimal dalam memberikan pelayanan	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi aparatur sehingga dapat berperan lebih optimal dalam memberikan pelayanan	100%	100%					580,936,896	2,164,400,000	2,323,925,000	159,525,000

NO MO R	URUSAN/ BIDANG, URUSAN DAERAH DAN PROGRA M/KEGIA TAN	L O K A S I		INDIKATOR KINERJA								KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RKPD 2018)	PAGU PENETAPAN APBD 2018	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG
				HASIL PROGRAM				KELUARAN KEGIATAN							
				TOLAK UKUR		TARGET		TOLAK UKUR		TARGET					
		SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN						
1	Pendidikan dan pelatihan formal	BAJAWA	BAJAWA					Aparatur PKD yang mengikuti diklat/bimtek	Aparatur PKD yang mengikuti diklat/bimtek	200 orang	250 orang	580,936,896	2,164,400,000	2,323,925,000.00	159,525,000
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BAJAWA	BAJAWA	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah	100%	100%					970,922,600.00	701,563,700.00	701,563,700.00	-
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	BAJAWA	BAJAWA					LK Konsolidasi Semester 1 TA. 2018	LK Konsolidasi Semester 1 TA. 2018	1 dokumen	1 dokumen	346,112,900	203,009,100.00	203,009,100.00	-
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BAJAWA	BAJAWA					LKPD TA. 2017	LKPD TA. 2017	1 dokumen	1 dokumen	624,809,700	498,554,600.00	498,554,600.00	-
V	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BAJAWA	BAJAWA	Meningkatnya status pelaporan pengelolaan Keuangan daerah	Meningkatnya status pelaporan pengelolaan Keuangan daerah	100%	100%					2,430,260,425	1,673,030,900	1,990,707,900	317,677,000

NO MO R	URUSAN/ BIDANG, URUSAN DAERAH DAN PROGRA M/KEGIA TAN	L O K A S I		INDIKATOR KINERJA								KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RKPD 2018)	PAGU PENETAPAN APBD 2018	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG
				HASIL PROGRAM				KELUARAN KEGIATAN							
				TOLAK UKUR		TARGET		TOLAK UKUR		TARGET					
		SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN						
1	Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)	BAJAWA	BAJAWA					Pengelolaan dana kas daerah	Pengelolaan dana kas daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,351,852,025	450,825,800.00	688,502,800.00	237,677,000
2	Peningkatan dan Pengendalian Interen Pengelolaan Keuangan Daerah	BAJAWA	BAJAWA					Pengendalian SPJ SKPD	Pengendalian SPJ SKPD	12 Bulan	12 Bulan	535,010,000	819,036,600.00	899,036,600.00	80,000,000
3	Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Aparatur Pengelolaan Keuangan Desa	BAJAWA	BAJAWA					Pengendalian SPJ ADD dan Dana Desa	Pengendalian SPJ ADD dan Dana Desa	12 Bulan	12 Bulan	543,398,400	403,168,500.00	403,168,500.00	-
VI	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BAJAWA	BAJAWA	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	100%	100%					7,730,720,400	6,043,215,900	6,661,928,945	618,713,045
1	Penyusunan Analisis Standar Belanja	BAJAWA	BAJAWA					SK Standar Belanja TA. 2019	SK Standar Belanja TA. 2019	1 dokumen	1 dokumen	70,991,000	151,682,000.00	177,682,000.00	26,000,000

NO MO R	URUSAN/ BIDANG, URUSAN DAERAH DAN PROGRA M/KEGIA TAN	L O K A S I		INDIKATOR KINERJA								KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RKPD 2018)	PAGU PENETAPAN APBD 2018	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG
				HASIL PROGRAM				KELUARAN KEGIATAN							
				TOLAK UKUR		TARGET		TOLAK UKUR		TARGET					
		SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN						
2	Penyusunan standar satuan harga	BAJAWA	BAJAWA					SK Standar Harga Barang TA. 2019	SK Standar Harga Barang TA. 2019	1 dokumen	1 dokumen	300,557,200	200,000,000.00	200,000,000.00	-
3	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	BAJAWA	BAJAWA					Ranperbup Kebijakan Akuntansi	Ranperbup Kebijakan Akuntansi	1 dokumen	1 dokumen	120,000,000	-	0.00	-
4	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	BAJAWA	BAJAWA					Ranperbup Sisdur PKD	Ranperbup Sisdur PKD	1 dokumen	1 dokumen	120,000,000	-	0.00	-
5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BAJAWA	BAJAWA					Ranperda APBD TA. 2019	Ranperda APBD TA. 2019	1 dokumen	1 dokumen	450,355,400	302,237,000.00	302,237,000.00	-
6	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	BAJAWA	BAJAWA					Ranperbup Penjabaran APBD TA. 2019	Ranperbup Penjabaran APBD TA. 2019	1 dokumen	1 dokumen	350,098,500	244,591,000.00	244,591,000.00	-
7	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	BAJAWA	BAJAWA					Ranperda Perubahan APBD TA. 2018	Ranperda Perubahan APBD TA. 2018	1 dokumen	1 dokumen	393,878,500	364,122,000.00	364,122,000.00	-

NO MO R	URUSAN/ BIDANG, URUSAN DAERAH DAN PROGRA M/KEGIA TAN	L O K A S I		INDIKATOR KINERJA								KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RKPD 2018)	PAGU PENETAPAN APBD 2018	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG
				HASIL PROGRAM				KELUARAN KEGIATAN							
				TOLAK UKUR		TARGET		TOLAK UKUR		TARGET					
		SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN						
8	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BAJAWA	BAJAWA					Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018	Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018	1 dokumen	1 dokumen	273,885,500	248,960,500.00	248,960,500.00	-
9	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	BAJAWA	BAJAWA					Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017	Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017	1 dokumen	1 dokumen	267,272,500	206,917,300.00	206,917,300.00	-
10	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	BAJAWA	BAJAWA					Ranperbup Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017	Ranperbup Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017	1 dokumen	1 dokumen	173,476,600	119,376,600.00	119,376,600.00	-
11	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	BAJAWA	BAJAWA					e-budgeting	e-budgeting	1 dokumen	1 dokumen	300,720,000	477,900,000.00	477,900,000.00	-
12	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	BAJAWA	BAJAWA					LBMD	LBMD	1 dokumen	1 dokumen	922,639,700	553,340,500.00	596,910,500.00	43,570,000

NO MO R	URUSAN/ BIDANG, URUSAN DAERAH DAN PROGRA M/KEGIA TAN	L O K A S I		INDIKATOR KINERJA								KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RKPD 2018)	PAGU PENETAPAN APBD 2018	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2018	BERTAMBAH/ BERKURANG
				HASIL PROGRAM				KELUARAN KEGIATAN							
				TOLAK UKUR		TARGET		TOLAK UKUR		TARGET					
		SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN	SEBELU M PERUBA HAN	SETELAH PERUBA HAN						
13	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	BAJAWA	BAJAWA					Ranperbup Investasi Daerah	Ranperbup Investasi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	120,000,000	13,200,000.00	13,200,000.00	-
14	Revaluasi/ Appraisal Aset/Barang Daerah	BAJAWA	BAJAWA					Sensus Barang Milik Daerah	Sensus Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	584,716,600	230,759,500.00	275,759,500.00	45,000,000
15	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	BAJAWA	BAJAWA					Target PAD	Target PAD	100%	100%	2,973,145,900	2,387,029,500.00	2,891,172,545.00	504,143,045
16	Pemutakiran Data Pajak Daerah dan Retibusi Daerah	BAJAWA	BAJAWA					Data base WP dan OP	Data base WP dan OP	1 dokumen	1 dokumen	258,483,000	519,600,000.00	519,600,000.00	-
	Penyusunan Manajemen Anggaran Kas	BAJAWA	BAJAWA					SPD	SPD	1 dokumen	1 dokumen	50,500,000	23,500,000.00	23,500,000.00	-
T O T A L												12,911,881,321.00	13,132,823,336.00	14,104,538,381.00	971,715,045